

KOMUNIKASI REKONSILIASI MELALUI TRADISI MANGAN MURUM DI BENER MERIAH

¹Arief Fadhillah, ²Rusli Yusuf, ³Ishak Hasan,

⁴Masrizal, ⁵Ella Fitriana

¹Universitas Ahmad Dahlan Aceh

^{2,3,4}Universitas Syiah Kuala

⁵Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

¹ arieffadhillah.indonesia@gmail.com, ² rusliyusuf@unsyiah.ac.id,

³ ishakhasan@utu.ac.id, ⁴ masrizalfisip@usk.ac.id, ⁵ ellafitriana2199@gmail.com

Abstract: *This study examines reconciliation communication through the Mangan Murum tradition in Bener Meriah Regency as a sociocultural space for rebuilding relationships among post-conflict multiethnic communities, particularly the Acehnese, Gayo, and Javanese. It analyzes how reconciliation communication is constructed through local cultural practices involving multiple social actors across the stages of initiation, dialogue, and collective ritual enactment. Using a qualitative approach with critical autoethnography, the researcher actively participated in the reconciliation process from stakeholder engagement to the implementation of the Mangan Murum ritual on August 10, 2025. Data were collected through participant observation, in-depth interviews, documentation, and reflective field notes. The findings show that reconciliation is gradually constructed through communication processes embedded in social interactions and cultural rituals rather than formal institutional mechanisms alone. The Mangan Murum tradition functions as a symbolic communicative space that restores trust, solidarity, and collective identity among communities affected by conflict. This study proposes the concept of Ritual Reconciliation Communication, defined as reconciliation enacted through communal ritual practices that reconstruct post-conflict social relations. The concept extends ritual communication and conflict transformation perspectives while highlighting indigenous cultural traditions as sustainable instruments for peacebuilding in multicultural societies.*

Keywords: *reconciliation communication, Mangan Murum, autoethnography, ritual communication, peacebuilding*

A. Pendahuluan

Konflik Aceh merupakan salah satu konflik politik dan kemanusiaan terpanjang di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1976 hingga ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005. Konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga meninggalkan trauma sosial, segregasi kelompok, serta rusaknya hubungan antarmasyarakat. Berbagai laporan menunjukkan bahwa konflik tersebut telah menyebabkan ribuan korban jiwa, perpindahan penduduk, serta terjadinya polarisasi sosial yang berlangsung dalam waktu lama. Perdamaian yang dicapai melalui MoU Helsinki memang berhasil mengakhiri kekerasan bersenjata, namun tidak serta-merta menghapus memori kolektif masyarakat terhadap pengalaman konflik yang pernah mereka alami.¹

Dalam studi perdamaian, kondisi tersebut dikenal sebagai *post-conflict society*, yaitu masyarakat yang secara formal telah memasuki fase damai tetapi masih menghadapi berbagai persoalan sosial yang bersumber dari pengalaman konflik masa lalu. Menurut Lederach (1997), tantangan terbesar masyarakat pascakonflik bukanlah menghentikan kekerasan, melainkan membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Oleh karena itu, rekonsiliasi menjadi agenda penting dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan (*sustainable peace*)².

Situasi tersebut juga terjadi di Kabupaten Bener Meriah, sebuah wilayah di dataran tinggi Gayo yang memiliki karakter masyarakat multietnis. Selain etnis Gayo sebagai kelompok mayoritas dan penduduk asli, wilayah ini juga dihuni oleh etnis Aceh dan Jawa yang telah lama menetap dan berinteraksi dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya³. Keragaman ini pada satu sisi menjadi kekuatan sosial, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan gesekan ketika terjadi dinamika politik dan konflik yang melibatkan identitas kelompok⁴.

Pada masa konflik Aceh, beberapa wilayah di Bener Meriah mengalami ketegangan sosial yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang etnis. Konflik yang berlangsung tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial antarwarga. Rasa saling curiga, ketidakpercayaan, dan munculnya batas-batas identitas

¹. S Tobias and T M Duffy, *Constructivist Instruction: Success or Failure?* (Routledge, 2009).

². J P Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies* (United States Institute of Peace Press, 1997).

³. Ade Irma, "Penerapan Komunikasi Antarbudaya Dai Dan Daiyah Dalam Berakwah Di Aceh" 7, no. 1 (2024): 37–60.

⁴. A R Usman, *Komunikasi Strategis Indonesia–Tiongkok* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

sosial menjadi bagian dari warisan konflik yang masih dapat dirasakan hingga masa pascaperdamaian. Dalam perspektif sosiologis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak hanya menghasilkan kerusakan fisik, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang membutuhkan proses pemulihan jangka panjang⁵.

Meskipun MoU Helsinki telah memasuki usia lebih dari dua dekade, upaya membangun integrasi sosial di tingkat akar rumput masih menjadi tantangan penting. Perdamaian tidak cukup dimaknai sebagai berhentinya kekerasan, melainkan harus diwujudkan melalui terbentuknya kembali hubungan sosial yang harmonis antar kelompok masyarakat yang pernah terbelah akibat konflik. Dalam konteks inilah masyarakat Bener Meriah mulai mengembangkan berbagai inisiatif lokal untuk memperkuat hubungan sosial dan mempertemukan kembali kelompok-kelompok yang pernah mengalami ketegangan ⁶.

Fenomena tersebut tampak dalam penyelenggaraan program Mangan Murum yang difasilitasi oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Program *Mangan Murum* KKR Aceh Tahun 2025, kegiatan ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di Kabupaten Bener Meriah pada 10 Agustus 2025 bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut mempertemukan tiga kelompok etnis, yaitu Gayo, Aceh, dan Jawa, yang pernah mengalami ketegangan sosial pada masa konflik sekitar dua dekade sebelumnya. Sebanyak kurang lebih 600 peserta menghadiri kegiatan tersebut yang terdiri atas penyintas konflik, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, perempuan, pemuda, serta masyarakat dari berbagai unsur etnis. Besarnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kegiatan ini memperoleh penerimaan yang luas sebagai ruang perjumpaan dan dialog sosial pascakonflik (KKR Aceh, 2025).⁷

Observasi awal yang dilakukan peneliti selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa seluruh peserta mengikuti rangkaian dialog dan tradisi makan bersama tanpa adanya pemisahan berdasarkan identitas etnis maupun status sosial. Interaksi yang terjadi selama kegiatan memperlihatkan suasana komunikasi yang terbuka, saling menyapa, berbagi pengalaman, dan membangun kembali hubungan antarkelompok dalam bingkai budaya lokal. Setelah kegiatan selesai, peneliti melakukan wawancara pendahuluan dengan **Safriandi**, Komisioner Rekonsiliasi KKR Aceh sekaligus penggagas program *Mangan Murum*. Dalam wawancara tersebut, Safriandi menjelaskan bahwa *Mangan Murum* dirancang bukan

⁵. J Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (International Peace Research Institute, 1996).

⁶. Tabrani ZA., *Menggugat Logika Nalar Rasionalisme Aristoteles* (Mizan, 2017).

⁷ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, "Laporan Pelaksanaan Program Mangan Murum Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025" (Banda Aceh: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, 2025).

sekadar sebagai kegiatan makan bersama, melainkan sebagai media rekonsiliasi yang menggunakan pendekatan budaya untuk mempertemukan kembali masyarakat yang pernah terpisah oleh konflik. Menurutnya, ruang budaya lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan forum formal karena menghadirkan suasana yang setara, akrab, dan memungkinkan setiap peserta berinteraksi tanpa sekat identitas (Wawancara pendahuluan dengan Safriandi, Komisioner Rekonsiliasi KKR Aceh, 10 Agustus 2025).⁸

Secara harfiah, *mangan* berarti makan, sedangkan *murum* merujuk pada aktivitas makan bersama dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan. Dalam praktik sosial masyarakat Gayo, tradisi ini tidak sekadar dimaknai sebagai kegiatan konsumsi makanan, tetapi merupakan simbol persaudaraan, penghormatan, kesetaraan, dan penerimaan sosial. Semua peserta duduk bersama tanpa membedakan status sosial, latar belakang etnis, maupun posisi ekonomi. Nilai-nilai tersebut menjadikan *Mangan Murum* sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi, dialog, dan pembentukan kembali hubungan sosial yang pernah mengalami keretakan.⁹

Temuan awal yang diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi kegiatan KKR Aceh, dan wawancara pendahuluan menunjukkan bahwa *Mangan Murum* memiliki fungsi yang melampaui tradisi budaya. Tradisi ini berkembang sebagai media komunikasi budaya yang berpotensi membangun kembali kepercayaan sosial (*social trust*), memperkuat kohesi antarkelompok, dan mendukung proses rekonsiliasi masyarakat pascakonflik. Namun demikian, penelitian mengenai mekanisme komunikasi yang berlangsung dalam praktik *Mangan Murum*, makna simbolik yang dibangun selama interaksi, serta kontribusinya terhadap rekonsiliasi sosial di Kabupaten Bener Meriah masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek politik perdamaian Aceh atau nilai budaya Gayo secara umum, sementara studi yang mengkaji *Mangan Murum* sebagai media komunikasi rekonsiliasi belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran tradisi *Mangan Murum* sebagai media komunikasi rekonsiliasi masyarakat pascakonflik di Kabupaten Bener Meriah.¹⁰

Salah satu bentuk inisiatif tersebut adalah pelaksanaan tradisi *Mangan Murum*. Secara harfiah, *mangan* berarti makan, sedangkan *murum* merujuk pada aktivitas makan bersama dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan. Dalam praktik sosial masyarakat Gayo, tradisi ini tidak sekadar dimaknai sebagai kegiatan konsumsi makanan, tetapi merupakan simbol persaudaraan, penghormatan, kesetaraan, dan

⁸. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, “Peulara Damee (Merawat Perdamaian): Laporan Temuan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh” (Banda Aceh: KKR Aceh, 2023).

⁹. M Junus Melalatoa, *Budaya Gayo* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

¹⁰. Robert D Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000).

penerimaan sosial. Semua peserta duduk bersama tanpa membedakan status sosial, latar belakang etnis, maupun posisi ekonomi. Nilai-nilai tersebut menjadikan *Mangan Murum* sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi, dialog, dan pembentukan kembali hubungan sosial yang pernah mengalami keretakan.¹¹

Menariknya, dalam berbagai momentum perdamaian masyarakat pascakonflik di Bener Meriah, tradisi *Mangan Murum* mulai dipraktikkan sebagai media pertemuan antara kelompok masyarakat yang sebelumnya terpisah oleh pengalaman konflik. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat Aceh, Gayo, dan Jawa dipertemukan dalam satu ruang budaya yang sama untuk berbagi pengalaman, mempererat hubungan sosial, dan membangun kembali rasa saling percaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen komunikasi yang efektif dalam proses rekonsiliasi sosial.¹²

Dari perspektif ilmu komunikasi, fenomena tersebut dapat dipahami melalui konsep komunikasi rekonsiliasi. Rekonsiliasi pada dasarnya merupakan proses komunikasi yang bertujuan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Lederach (1997) menjelaskan bahwa rekonsiliasi mencakup empat elemen utama, yaitu kebenaran (*truth*), keadilan (*justice*), belas kasih (*mercy*), dan perdamaian (*peace*). Keempat elemen tersebut hanya dapat diwujudkan melalui komunikasi yang memungkinkan individu dan kelompok saling mendengar, memahami, dan membangun kembali kepercayaan yang hilang akibat konflik.¹³

Pandangan serupa dikemukakan oleh Johan Galtung (1996) yang memperkenalkan konsep *positive peace*. Menurut Galtung, perdamaian sejati tidak hanya ditandai oleh absennya kekerasan (*negative peace*), tetapi juga adanya hubungan sosial yang harmonis, keadilan sosial, dan kerja sama antarkelompok. Dalam konteks ini, rekonsiliasi menjadi proses komunikasi yang mampu mentransformasikan hubungan antagonistik menjadi hubungan kooperatif.¹⁴

Selanjutnya, James W. Carey (2009) melalui teori komunikasi ritual menjelaskan bahwa komunikasi tidak semata-mata berfungsi mentransmisikan informasi, melainkan memelihara dan membangun kehidupan bersama. Ritual budaya merupakan bentuk komunikasi yang memungkinkan masyarakat membangun makna kolektif, memperkuat solidaritas sosial, dan mempertahankan integrasi komunitas. Oleh karena

¹¹. Rini Afriani, "Analisis Struktur Melengkan," *Master Bahasa* 6, no. 1 (2018): 67–77.

¹². Heru Sofyan, "Peran Komunikasi Lintas Budaya Dalam Membangun Keharmonisan Antar Santri (Studi Kasus Pesantren Life Skill Daarun Najaah)" 6, no. 2 (2023): 127–38.

¹³. Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*.

¹⁴. Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*.

itu, *Mangan Murum* dapat dipahami sebagai ritual komunikasi yang menghadirkan ruang simbolik bagi masyarakat untuk membangun kembali relasi sosial pascakonflik¹⁵.

Kajian mengenai rekonsiliasi berbasis budaya lokal telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian mengenai *Pela Gandong* di Maluku menemukan bahwa tradisi lokal berfungsi sebagai instrumen perdamaian pascakonflik komunal. Studi tentang *Situwu Maroso* di Poso menunjukkan bahwa nilai budaya lokal mampu memperkuat kohesi sosial masyarakat pascakonflik. Sementara itu, penelitian mengenai berbagai tradisi makan bersama di Indonesia menegaskan bahwa ritual komunal memiliki peran penting dalam membangun solidaritas dan integrasi sosial masyarakat multikultural^{16 17}.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih memposisikan budaya lokal sebagai instrumen resolusi konflik atau integrasi sosial secara umum. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak menjelaskan bagaimana proses komunikasi yang berlangsung dalam ritual budaya mampu menghasilkan rekonsiliasi antarkelompok yang pernah mengalami konflik. Selain itu, kajian tentang tradisi *Mangan Murum* masih didominasi oleh perspektif antropologi budaya dan pelestarian adat, sementara perspektif komunikasi rekonsiliasi relatif belum mendapatkan perhatian yang memadai¹⁸.

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji *Mangan Murum* sebagai mekanisme komunikasi rekonsiliasi antara etnis Aceh, Gayo, dan Jawa dalam konteks masyarakat pascakonflik di Kabupaten Bener Meriah. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang akademik yang penting untuk diisi. Penelitian ini tidak hanya berupaya memahami fungsi budaya lokal sebagai media perdamaian, tetapi juga menjelaskan proses komunikasi yang memungkinkan terjadinya pemulihan hubungan sosial, pembentukan kembali kepercayaan, dan penguatan integrasi sosial antaretnis.¹⁹

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada pengembangan konsep *komunikasi rekonsiliasi berbasis ritual budaya lokal* yang menjelaskan bagaimana tradisi *Mangan Murum* berfungsi

¹⁵. J W Carey, *Communication as Culture: Essays on Media and Society* (Routledge, 2009).

¹⁶. T Paffenholz, *Civil Society and Peacebuilding* (Lynne Rienner Publishers, 2010).

¹⁷. R Mac Ginty, *Everyday Peace: How so-Called Ordinary People Can Disrupt Violent Conflict* (Oxford University Press, 2021).

¹⁸. Usman, *Komunikasi Strategis Indonesia-Tiongkok*.

¹⁹. Teuku Zulyadi, "Komunikasi Pembangunan Masyarakat; Sebuah Model Audit Sosial Multistakeholder," *KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT; SEBUAH MODEL AUDIT SOSIAL MULTISTAKEHOLDER* 1, no. 1 (2018): 1–15, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi>.

sebagai ruang komunikasi simbolik dalam membangun kembali hubungan sosial antara etnis Aceh, Gayo, dan Jawa pascakonflik. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori komunikasi rekonsiliasi sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pembangunan perdamaian berbasis kearifan lokal di masyarakat multikultural.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana tradisi *Mangan Murum* dimaknai sebagai media komunikasi rekonsiliasi oleh masyarakat Bener Meriah, bagaimana proses komunikasi yang berlangsung di dalamnya mampu membangun kembali kepercayaan antaretnis yang pernah mengalami konflik, serta bagaimana tradisi tersebut berkontribusi terhadap terciptanya integrasi sosial yang berkelanjutan dalam masyarakat pascakonflik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode autoetnografi kritis (*critical autoethnography*). Pendekatan kualitatif ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi mendalam²⁰. Metode ini dipilih karena peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses komunikasi rekonsiliasi yang menjadi fokus penelitian. Autoetnografi memungkinkan pengalaman, refleksi, dan keterlibatan peneliti digunakan sebagai sumber data untuk memahami fenomena sosial, budaya, dan komunikasi yang terjadi dalam konteks tertentu^{21 22}.

Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena hanya akan menggambarkan secara rinci dan menganalisis fenomena sosial yang ditemukan²³. Dalam penelitian ini, peneliti menempati posisi sebagai *participant observer* yang terlibat sejak tahap awal inisiasi rekonsiliasi hingga pelaksanaan tradisi *Mangan Murum*. Keterlibatan tersebut diawali dengan proses penjajakan yang dilakukan oleh mantan Panglima Linge, Fauzan Azima, dalam upaya mempertemukan kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak konflik masa lalu di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya, peneliti mengikuti berbagai audiensi dan dialog yang dilakukan dengan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Bupati Bener Meriah saat itu, Tagore Abubakar, tokoh-tokoh keturuna

²⁰ Serli et al., "Makna Simbolik Pada Kain *Tabekh* Dalam Adat Istiadat Kota Subulussalam Ditinjau Dari Semiotika Peirce," *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 8, no. 2 (2025): 81–98, <https://doi.org/10.22373/jnmmb77>.

²¹ C Ellis, T E Adams, and A P Bochner, "Autoethnography: An Overview," *Historical Social Research / Historische Sozialforschung* 36, no. 4 (2011): 273–90, <https://www.jstor.org/stable/23032294>.

²² W Walidin, S Idris, and Tabrani ZA., *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (FTK Ar-Raniry Press, 2015).

²³ Fakhur Rozi and Nazil Mumtaz Al-Mujtahid, "ANALISIS KOMUNIKASI KRISIS PADA KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 2025" 9, no. 1 (2026).

etnis Jawa, keluarga korban konflik, unsur Kepolisian Daerah Aceh yang diwakili Direktorat Intelijen dan Keamanan, serta jajaran Komando Daerah Militer Iskandar Muda. Keterlibatan tersebut berlanjut hingga pelaksanaan kegiatan *Mangan Murum* pada tanggal 10 Agustus 2025 yang mempertemukan masyarakat dari etnis Aceh, Gayo, dan Jawa dalam satu ruang budaya yang sama ²⁴.

Data penelitian diperoleh melalui observasi partisipatif, catatan lapangan, dokumentasi kegiatan, arsip hasil pertemuan, refleksi peneliti, serta wawancara mendalam dengan para aktor yang terlibat dalam proses rekonsiliasi. Informan penelitian dipilih secara purposif berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam proses komunikasi rekonsiliasi, meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh etnis Aceh, Gayo, dan Jawa, penyelenggara kegiatan, aparat pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan *Mangan Murum*.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik yang dikembangkan Braun dan Clarke (2006). Tahapan analisis meliputi pengorganisasian data, pengkodean, identifikasi tema-tema utama, interpretasi makna, dan penyusunan narasi analitis. Dalam penelitian ini, analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pola-pola komunikasi yang muncul selama proses rekonsiliasi, bentuk-bentuk interaksi yang membangun kembali kepercayaan antaretnis, serta makna simbolik yang terkandung dalam praktik budaya *Mangan Murum*. ²⁵.

Interpretasi data didasarkan pada Teori Komunikasi Ritual yang dikemukakan James W. Carey (2009) dan Teori Transformasi Konflik yang dikembangkan John Paul Lederach (1997). Teori Komunikasi Ritual digunakan untuk menjelaskan bagaimana *Mangan Murum* berfungsi sebagai ritual komunikasi yang membangun makna kolektif, solidaritas sosial, dan identitas bersama. Sementara itu, Teori Transformasi Konflik digunakan untuk memahami bagaimana praktik budaya tersebut menjadi sarana pemulihan hubungan sosial dan rekonstruksi kepercayaan antara kelompok-kelompok masyarakat yang pernah mengalami konflik ^{26 27}.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik²⁸. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *Mangan Murum*, yaitu Safriandi selaku

²⁴. B G Tabachnick and L S Fidell, *Using Multivariate Statistics*, ed. 5 (Allyn & Bacon, 2007).

²⁵. V Braun and V Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101, <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.

²⁶. Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*.

²⁷. J Habermas, *The Theory of Communicative Action* (Beacon Press, 1984).

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

Komisioner Rekonsiliasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sekaligus penggagas program, tokoh adat Gayo, tokoh masyarakat, serta peserta kegiatan yang berasal dari etnis Gayo, Aceh, dan Jawa. Perbandingan dilakukan terhadap informasi mengenai latar belakang penyelenggaraan *Mangan Murum*, tujuan kegiatan, makna simbolik tradisi, bentuk komunikasi yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan, serta perannya dalam membangun kembali hubungan sosial masyarakat pascakonflik.

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi²⁹. Data hasil wawancara diverifikasi melalui observasi langsung yang dilakukan peneliti pada pelaksanaan kegiatan *Mangan Murum* di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Bener Meriah pada 10 Agustus 2025. Observasi difokuskan pada pola komunikasi antarpeserta, bentuk interaksi antara masyarakat dari etnis Gayo, Aceh, dan Jawa, serta pelaksanaan tradisi makan bersama sebagai media rekonsiliasi. Selanjutnya, hasil observasi dan wawancara dibandingkan dengan dokumen resmi berupa Laporan Pelaksanaan Program Mangan Murum Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh untuk memverifikasi data mengenai waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, jumlah peserta, rangkaian kegiatan, dan keterlibatan masyarakat dari berbagai kelompok etnis. Apabila terdapat perbedaan informasi antar sumber maupun antar teknik pengumpulan data, peneliti melakukan penelusuran kembali melalui wawancara lanjutan dan penelaahan dokumen hingga diperoleh data yang konsisten.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai proses komunikasi rekonsiliasi yang melatar belakangi pelaksanaan tradisi *Mangan Murum* di Kabupaten Bener Meriah. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, dokumentasi kegiatan, catatan lapangan, refleksi peneliti, serta wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses rekonsiliasi. Penyajian hasil disusun secara kronologis berdasarkan tahapan proses yang berlangsung, mulai dari inisiasi rekonsiliasi, pelaksanaan dialog dengan para pemangku kepentingan, hingga penyelenggaraan *Mangan Murum* sebagai ruang perjumpaan antaretnis.

Inisiasi Rekonsiliasi dan Upaya Membangun Kesediaan untuk Berdialog

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi yang melatarbelakangi pelaksanaan *Mangan Murum* tidak terjadi secara

²⁹ John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018).

spontan, melainkan melalui tahapan komunikasi yang cukup panjang. Proses tersebut diawali oleh inisiatif mantan Panglima Linge, Fauzan Azima, yang berupaya membangun kembali hubungan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang pernah mengalami ketegangan pada masa konflik Aceh.

Pada tahap awal, komunikasi dilakukan secara informal melalui pertemuan-pertemuan terbatas dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, serta pihak-pihak yang memiliki pengalaman langsung terhadap konflik masa lalu. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui respons masyarakat terhadap gagasan rekonsiliasi sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang berpotensi muncul dalam proses mempertemukan kelompok-kelompok yang pernah mengalami konflik.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan menyampaikan bahwa masih terdapat rasa hati-hati ketika gagasan rekonsiliasi mulai diperkenalkan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa konflik telah berlalu, namun sebagian lainnya masih menyimpan pengalaman dan ingatan yang kuat terhadap peristiwa yang pernah terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendekatan awal dilakukan secara bertahap dan mengutamakan komunikasi personal.

Seorang tokoh masyarakat menjelaskan:

“Pertemuan awal tidak langsung membicarakan perdamaian secara formal. Yang dilakukan lebih banyak membangun silaturahmi terlebih dahulu agar masing-masing pihak merasa nyaman untuk berbicara.” (TM-01, wawancara, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fase awal rekonsiliasi lebih banyak diwarnai oleh upaya membangun komunikasi interpersonal sebelum memasuki pembahasan yang berkaitan dengan pengalaman konflik.

Audiensi dengan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan

Setelah komunikasi awal memperoleh respons positif dari berbagai pihak, proses rekonsiliasi dilanjutkan melalui audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Pertemuan tersebut melibatkan Bupati Bener Meriah saat itu, Tagore Abubakar, beserta unsur pemerintah daerah lainnya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa audiensi tersebut menjadi salah satu ruang penting untuk menyampaikan tujuan kegiatan sekaligus memperoleh dukungan terhadap rencana pelaksanaan rekonsiliasi berbasis budaya. Dalam forum tersebut, berbagai pihak menyampaikan pandangan mengenai pentingnya menjaga hubungan harmonis antar kelompok

masyarakat di Bener Meriah yang memiliki latar belakang etnis yang beragam.

Selain dengan pemerintah daerah, proses komunikasi juga dilakukan dengan tokoh-tokoh etnis Jawa dan sejumlah keluarga yang pernah terdampak konflik. Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan serta harapan mereka terhadap hubungan sosial di masa mendatang.

Salah seorang perwakilan masyarakat menyampaikan:

“Yang penting bagi kami sekarang adalah bagaimana anak-anak dan generasi berikutnya dapat hidup berdampingan dengan baik tanpa membawa persoalan masa lalu.” (MJ-03, wawancara, 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa isu yang sering muncul dalam berbagai pertemuan bukan hanya berkaitan dengan pengalaman masa lalu, tetapi juga harapan terhadap masa depan hubungan antar masyarakat.

Keterlibatan Aparat Keamanan dalam Mendukung Rekonsiliasi

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterlibatan berbagai institusi keamanan dalam mendukung proses rekonsiliasi. Komunikasi dilakukan melalui audiensi dengan Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Aceh yang diwakili oleh Kombes Pol. Said Anna Fauza serta koordinasi dengan unsur Komando Daerah Militer Iskandar Muda.

Berdasarkan dokumentasi kegiatan dan catatan lapangan, pertemuan tersebut membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan keamanan, dukungan kelembagaan, serta upaya menjaga suasana kondusif selama proses rekonsiliasi berlangsung.

Keberadaan unsur keamanan dalam berbagai tahapan persiapan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Hal tersebut turut mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam agenda rekonsiliasi yang direncanakan.

Pelaksanaan Tradisi Mangan Murum sebagai Ruang Perjumpaan Bersama

Puncak dari rangkaian proses rekonsiliasi diwujudkan melalui pelaksanaan tradisi *Mangan Murum* yang berlangsung di Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 10 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat yang berasal dari etnis Aceh, Gayo, dan Jawa, serta melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat umum.

Hasil observasi menunjukkan bahwa seluruh peserta ditempatkan dalam ruang yang sama tanpa adanya pemisahan berdasarkan identitas etnis maupun status sosial. Masyarakat duduk berdampingan dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara bersama-sama.

Selain kegiatan makan bersama, acara juga diisi dengan penyampaian pesan-pesan kebersamaan, silaturahmi, serta harapan untuk menjaga hubungan harmonis di masa mendatang. Selama kegiatan berlangsung, terlihat interaksi yang intens antara peserta yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka saling berbincang, bertukar cerita, dan berinteraksi dalam suasana yang berlangsung secara terbuka.

Seorang peserta kegiatan menyatakan:

“Kami duduk bersama, makan bersama, dan berbicara bersama. Kegiatan seperti ini membuat kami merasa menjadi bagian dari masyarakat yang sama.” (PG-05, wawancara, 2025)

Kutipan tersebut menggambarkan bagaimana peserta memaknai keterlibatan mereka dalam kegiatan yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu ruang sosial yang sama.

Munculnya Narasi Kebersamaan dan Harapan Masa Depan

Hasil wawancara setelah pelaksanaan *Mangan Murum* menunjukkan munculnya berbagai narasi yang menekankan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kehidupan yang harmonis antaretnis. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan kesempatan untuk memperkuat kembali hubungan sosial yang selama ini terjalin dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa informan juga menilai bahwa pertemuan yang berlangsung melalui *Mangan Murum* menjadi momentum penting untuk membangun suasana yang lebih kondusif dan mempererat hubungan antar kelompok masyarakat.

Seorang tokoh adat menyampaikan:

“Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat Bener Meriah mampu hidup bersama dalam keberagaman. Yang dipelihara bukan perbedaannya, tetapi persaudaraannya.” (TA-02, wawancara, 2025)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut secara konsisten menyampaikan pesan-pesan mengenai persaudaraan, kebersamaan, dan pentingnya menjaga hubungan harmonis antar masyarakat yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan *Mangan Murum* didahului oleh rangkaian komunikasi yang

melibatkan berbagai aktor, mulai dari tokoh masyarakat, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat lintas etnis. Proses tersebut berlangsung melalui tahapan penjajakan, dialog, koordinasi, dan pertemuan bersama yang kemudian bermuara pada pelaksanaan *Mangan Murum* sebagai ruang perjumpaan masyarakat multietnis di Kabupaten Bener Meriah.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi antaretnis di Kabupaten Bener Meriah tidak terjadi melalui mekanisme formal yang bersifat legalistik semata, melainkan dibangun melalui rangkaian proses komunikasi yang berakar pada praktik budaya lokal. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan rekonsiliasi tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan politik atau penghentian konflik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menciptakan ruang-ruang komunikasi yang memungkinkan terjadinya pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks ini, *Mangan Murum* berfungsi sebagai medium yang mempertemukan kelompok-kelompok yang pernah mengalami ketegangan untuk membangun kembali relasi sosial dalam suasana yang setara dan inklusif.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan John Paul Lederach yang menempatkan rekonsiliasi sebagai proses transformasi hubungan sosial, bukan sekadar penyelesaian konflik. Lederach menegaskan bahwa perdamaian berkelanjutan hanya dapat tercapai ketika masyarakat yang pernah berkonflik mampu membangun kembali hubungan yang rusak melalui interaksi yang menghasilkan kepercayaan, pengakuan, dan harapan bersama. Dalam penelitian ini, proses penjajakan, audiensi, dialog dengan berbagai aktor, hingga pelaksanaan *Mangan Murum* menunjukkan bahwa rekonsiliasi berlangsung sebagai proses komunikasi bertahap yang memungkinkan terbentuknya kembali hubungan sosial yang sebelumnya terfragmentasi akibat pengalaman konflik.³⁰

Lebih jauh, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa komunikasi rekonsiliasi tidak muncul secara spontan pada saat pelaksanaan *Mangan Murum*, melainkan diawali oleh proses komunikasi pra-rekonsiliasi yang melibatkan negosiasi makna, pembangunan kesediaan untuk berdialog, dan pembentukan rasa aman di antara para pihak. Fakta ini memperluas pemahaman tentang rekonsiliasi yang selama ini sering dipersepsikan sebagai peristiwa tunggal atau seremoni simbolik. Dalam kasus Bener Meriah, rekonsiliasi justru tampak sebagai proses komunikasi berlapis yang melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan kelompok masyarakat lintas etnis. Dengan demikian, rekonsiliasi dapat dipahami sebagai proses sosial yang dibangun melalui

³⁰. Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*.

interaksi berkelanjutan, bukan sekadar hasil dari sebuah kegiatan seremonial.

Dari perspektif komunikasi, temuan penelitian ini memperkuat relevansi Teori Komunikasi Ritual yang dikemukakan oleh James W. Carey. Carey memandang komunikasi tidak hanya sebagai proses transmisi informasi, tetapi juga sebagai praktik budaya yang memelihara kehidupan bersama melalui penciptaan makna kolektif. Dalam konteks *Mangan Murum*, aktivitas makan bersama bukanlah tindakan biologis semata, melainkan ritual sosial yang mengandung simbol-simbol persaudaraan, kesetaraan, dan penerimaan sosial. Ketika masyarakat Aceh, Gayo, dan Jawa duduk dalam ruang yang sama tanpa sekat identitas, yang sedang berlangsung bukan hanya interaksi interpersonal, melainkan reproduksi makna sosial tentang kebersamaan dan kehidupan bersama pascakonflik.

Temuan ini memperlihatkan bahwa ritual budaya memiliki kemampuan untuk mengurangi jarak sosial yang muncul akibat pengalaman konflik. Melalui ritual yang dijalankan bersama, identitas kelompok yang sebelumnya berfungsi sebagai pembatas perlahan berubah menjadi identitas kolektif yang lebih inklusif. Dalam hal ini, *Mangan Murum* tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi arena simbolik tempat masyarakat mendefinisikan ulang hubungan sosial mereka. Proses tersebut menunjukkan bahwa komunikasi rekonsiliasi dapat berlangsung melalui praktik budaya yang sederhana namun memiliki makna sosial yang mendalam.³¹

Hasil penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan konsep *positive peace* yang diperkenalkan oleh Johan Galtung. Galtung membedakan perdamaian negatif sebagai ketiadaan kekerasan dengan perdamaian positif yang ditandai oleh hadirnya hubungan sosial yang harmonis, keadilan sosial, dan kerja sama antarkelompok. Dalam konteks penelitian ini, *Mangan Murum* menunjukkan bahwa rekonsiliasi tidak berhenti pada absennya konflik terbuka, tetapi diarahkan pada pembangunan kembali hubungan sosial yang memungkinkan masyarakat hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol perdamaian, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mendukung terciptanya perdamaian positif dalam masyarakat multietnis.³²

Temuan penelitian ini memiliki perbedaan dengan sejumlah penelitian terdahulu mengenai kearifan lokal dan perdamaian. Berbagai studi tentang *Pela Gandong* di Maluku, *Situwu Maroso* di Poso, maupun tradisi komunal lainnya di Indonesia umumnya menempatkan budaya lokal sebagai instrumen resolusi konflik atau penguatan kohesi sosial. Namun,

³¹. Carey, *Communication as Culture: Essays on Media and Society*.

³². Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*.

penelitian ini menunjukkan bahwa budaya lokal juga dapat dipahami sebagai proses komunikasi rekonsiliasi yang secara aktif membangun kembali kepercayaan dan hubungan sosial antarkelompok. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat budaya sebagai sarana integrasi sosial, tetapi juga sebagai mekanisme komunikasi yang memungkinkan transformasi hubungan sosial pascakonflik.³³³⁴

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan konsep yang dapat disebut sebagai **Ritual Reconciliation Communication** atau Komunikasi Rekonsiliasi Ritual. Konsep ini merujuk pada proses komunikasi yang berlangsung melalui praktik budaya komunal dan berfungsi sebagai media pemulihan hubungan sosial, pembangunan kembali kepercayaan, serta pembentukan identitas kolektif baru di antara kelompok-kelompok yang pernah mengalami konflik. Konsep ini memperluas kajian komunikasi perdamaian dengan menunjukkan bahwa rekonsiliasi tidak selalu harus berlangsung melalui forum formal, mediasi politik, atau mekanisme hukum, tetapi dapat tumbuh dari praktik budaya yang hidup dalam masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi perdamaian dengan menghubungkan Teori Komunikasi Ritual dan Teori Transformasi Konflik dalam satu kerangka analitis. Penelitian ini menunjukkan bahwa ritual budaya tidak hanya berfungsi mempertahankan tradisi, tetapi juga berperan sebagai medium transformasi hubungan sosial pascakonflik. Temuan ini membuka peluang bagi pengembangan perspektif baru mengenai komunikasi rekonsiliasi berbasis budaya lokal yang selama ini masih relatif terbatas dalam literatur komunikasi Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan pelajaran penting bagi upaya pembangunan perdamaian di masyarakat multikultural. Pengalaman Bener Meriah menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi sumber daya sosial yang efektif dalam membangun kembali hubungan antarkelompok. Oleh karena itu, program rekonsiliasi yang dikembangkan oleh pemerintah, lembaga adat, maupun organisasi masyarakat dapat mempertimbangkan penggunaan ritual budaya lokal sebagai bagian dari strategi perdamaian yang berkelanjutan.

Selain memiliki relevansi lokal, penelitian ini juga memiliki signifikansi internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, kajian tentang *indigenous peacebuilding* dan *community-based reconciliation* berkembang di berbagai wilayah pascakonflik seperti Rwanda, Afrika Selatan, Kolombia, dan Irlandia Utara. Temuan penelitian ini menunjukkan

³³. (Paffenholz 2010

³⁴. ; Richmond 2011)

bahwa pengalaman masyarakat Bener Meriah dapat memperkaya diskursus global mengenai peran budaya lokal dalam proses rekonsiliasi. Jika banyak studi internasional menyoroti mekanisme rekonsiliasi melalui komisi kebenaran, mediasi, atau pendekatan hukum, maka kasus *Mangan Murum* memperlihatkan bagaimana ritual budaya dapat menjadi alternatif mekanisme rekonsiliasi yang tumbuh dari masyarakat sendiri. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan perspektif lintas budaya mengenai pembangunan perdamaian berbasis komunitas^{35; 36}

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian berfokus pada satu kasus rekonsiliasi di Kabupaten Bener Meriah sehingga temuan yang dihasilkan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi pada seluruh masyarakat pascakonflik di Aceh. Kedua, posisi peneliti yang terlibat langsung dalam proses rekonsiliasi memberikan kedalaman data yang tinggi, namun sekaligus memerlukan reflektivitas yang kuat dalam proses interpretasi. Ketiga, penelitian ini lebih menyoroti dimensi komunikasi dan belum mengkaji secara mendalam aspek psikologis maupun politik dari proses rekonsiliasi yang berlangsung.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian komparatif antara berbagai praktik rekonsiliasi berbasis budaya di Aceh maupun daerah lain di Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari komunikasi rekonsiliasi terhadap pembentukan kohesi sosial, identitas kolektif, dan ketahanan perdamaian dalam masyarakat multietnis. Dengan demikian, pemahaman mengenai komunikasi rekonsiliasi berbasis budaya lokal dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu komunikasi, studi perdamaian, dan pembangunan masyarakat pascakonflik.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Mangan Murum* di Kabupaten Bener Meriah tidak hanya berfungsi sebagai praktik budaya makan bersama, tetapi juga sebagai ruang komunikasi rekonsiliasi yang berperan penting dalam pemulihan hubungan sosial masyarakat multietnis pascakonflik. Proses rekonsiliasi yang terjadi tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui tahapan komunikasi yang panjang dan berlapis, mulai dari inisiasi oleh tokoh masyarakat, proses dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, hingga terciptanya ruang pertemuan bersama dalam bentuk ritual budaya. Keseluruhan proses tersebut memperlihatkan bahwa perdamaian sosial dibangun melalui interaksi komunikasi yang

³⁵. (Autesserre 2021

³⁶. Mac Ginty 2021)

bersifat partisipatif, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi rekonsiliasi tidak hanya berlangsung dalam ruang-ruang formal dan institusional, tetapi juga dapat terwujud melalui praktik ritual budaya yang memiliki makna simbolik kuat dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, *Mangan Murum* menjadi medium yang memungkinkan terbentuknya kembali kepercayaan, solidaritas, dan identitas kolektif di antara etnis Aceh, Gayo, dan Jawa yang pernah mengalami ketegangan pada masa konflik. Temuan ini sekaligus memperkuat pandangan bahwa perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan proses komunikasi yang bersumber dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu sendiri.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan konsep *Ritual Reconciliation Communication*, yaitu suatu bentuk komunikasi rekonsiliasi yang berlangsung melalui ritual budaya komunal dalam rangka membangun kembali hubungan sosial pascakonflik. Konsep ini memperluas kajian komunikasi ritual dengan menunjukkan bahwa praktik budaya tidak hanya berfungsi mempertahankan solidaritas sosial, tetapi juga dapat menjadi instrumen transformasi hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam studi komunikasi perdamaian berbasis kearifan lokal.

Selain kontribusi teoretis, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi upaya pembangunan perdamaian di masyarakat multikultural. Pengalaman *Mangan Murum* menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya lokal dapat menjadi alternatif yang efektif dalam memperkuat rekonsiliasi sosial di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai budaya dalam program pembangunan perdamaian menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan harmoni sosial di masyarakat pascakonflik.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus kajian yang hanya berpusat pada satu kasus rekonsiliasi di Kabupaten Bener Meriah serta keterlibatan peneliti dalam proses penelitian yang menuntut reflektivitas tinggi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian pada konteks daerah lain serta mengembangkan pendekatan komparatif terhadap berbagai praktik rekonsiliasi berbasis budaya di Indonesia maupun di tingkat internasional. Hal ini penting untuk memperkaya pemahaman mengenai variasi model komunikasi rekonsiliasi dalam masyarakat pascakonflik yang berbeda konteks sosial dan budayanya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi rekonsiliasi berbasis ritual budaya lokal memiliki peran strategis dalam

membangun kembali hubungan sosial pascakonflik, sekaligus memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu komunikasi, studi perdamaian, dan penguatan kohesi sosial dalam masyarakat multikultural.

Daftar Pustaka

- Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. "Laporan Pelaksanaan Program Mangan Murum Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025." Banda Aceh: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, 2025.
- . "Peulara Damee (Merawat Perdamaian): Laporan Temuan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh." Banda Aceh: KKR Aceh, 2023.
- Afriani, Rini. "Analisis Struktur Melengkan." *Master Bahasa* 6, no. 1 (2018): 67–77.
- Autesserre, S. *The Frontlines of Peace*. Oxford University Press, 2021.
- Braun, V, and V Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>.
- Carey, J W. *Communication as Culture: Essays on Media and Society*. Routledge, 2009.
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.
- Ellis, C, T E Adams, and A P Bochner. "Autoethnography: An Overview." *Historical Social Research / Historische Sozialforschung* 36, no. 4 (2011): 273–90. <https://www.jstor.org/stable/23032294>.
- Galtung, J. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. International Peace Research Institute, 1996.
- Ginty, R Mac. *Everyday Peace: How so-Called Ordinary People Can Disrupt Violent Conflict*. Oxford University Press, 2021.
- Habermas, J. *The Theory of Communicative Action*. Beacon Press, 1984.
- Irma, Ade. "Penerapan Komunikasi Antarbudaya Dai Dan Daiyah Dalam Berakwah Di Aceh" 7, no. 1 (2024): 37–60.
- Lederach, J P. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press, 1997.
- Melalatoa, M Junus. *Budaya Gayo*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Paffenholz, T. *Civil Society and Peacebuilding*. Lynne Rienner Publishers, 2010.
- Putnam, Robert D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.
- Richmond, O P. *A Post-Liberal Peace*. Routledge, 2011.
- Rozi, Fakhrur, and Nazil Mumtaz Al-Mujtahid. "ANALISIS KOMUNIKASI KRISIS PADA KEMENTERIAN AGAMA DALAM

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 2025” 9, no. 1 (2026).

Serli, Al Zuhri, Aulia Risky, and Said Fadhlain. “Makna Simbolik Pada Kain *Tabekh* Dalam Adat Istiadat Kota Subulussalam Ditinjau Dari Semiotika Peirce.” *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 8, no. 2 (2025): 81–98. <https://doi.org/10.22373/jnmmhb77>.

Sofyan, Heru. “Peran Komunikasi Lintas Budaya Dalam Membangun Keharmonisan Antar Santri (Studi Kasus Pesantren Life Skill Daarun Najaah)” 6, no. 2 (2023): 127–38.

Tabachnick, B G, and L S Fidell. *Using Multivariate Statistics*. Edited by 5. Allyn & Bacon, 2007.

Tobias, S, and T M Duffy. *Constructivist Instruction: Success or Failure?* Routledge, 2009.

Usman, A R. *Komunikasi Strategis Indonesia–Tiongkok*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

Walidin, W, S Idris, and Tabrani ZA. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. FTK Ar-Raniry Press, 2015.

ZA., Tabrani. *Menggugat Logika Nalar Rasionalisme Aristoteles*. Mizan, 2017.

Zulyadi, Teuku. “Komunikasi Pembangunan Masyarakat; Sebuah Model Audit Sosial Multistakeholder.” *KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT; SEBUAH MODEL AUDIT SOSIAL MULTISTAKEHOLDER* 1, no. 1 (2018): 1–15. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi>.